



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRIAL AMANULLAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 853203

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.431.310.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 553 m2/170 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, Rp. 1.194.310.000
2. Tanah Seluas 419 m2 di KAB / KOTA KOTA LHOKSEUMAWE , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 8.670 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **129.900.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS YARIS 1.5 E MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125SD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000



3. MOTOR, HONDA AT11121B01A/4 Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000

4. MOTOR, YAMAHA 25V Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

5. MOTOR, HONDA SCOOPY PRESTIGE Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 770.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 352.658.491

F. HARTA LAINNYA Rp. 59.000.000

Sub Total Rp. 2.743.768.491

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.743.768.491

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.